Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 30823-30838

Pengaruh Faktor Karakteristik Pemerintah Daerah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua

Ruth Sarlota Chlasina Anasanay[1], Adolf Z. D. Siahay[2], Hesty T. Salle [3]

[1,2,3]Univeristas Cenderawasih, Indonesia

Corresponding Author: ransanay8@gmail.com

Published: Juni, 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of local government size, prosperity, dependency level, audit findings on compliance, and audit findings on the reliability of the internal control system on the financial performance of local governments in Papua Province. This research uses a quantitative approach with a causal research design. The population consists of all regency/municipal governments in Papua Province during the 2019–2022 period. The sampling technique used is saturated sampling, in which all members of the population are used as research samples, resulting in 36 observations. The data used in this study are secondary data obtained from local government financial reports, budget realization reports, balance sheets, and audit reports. The data were collected from the Ministry of Finance, the Audit Board of the Republic of Indonesia, the Regional Financial and Asset Management Agency, and the BPK Representative Office of Papua Province. The data were analyzed using multiple linear regression with SPSS Version 23. The results show that prosperity and dependency level have a significant effect on local government financial performance. Meanwhile, local government size, audit findings on compliance, and audit findings on the reliability of the internal control system do not have a significant effect on local government financial performance in Papua Province. These findings indicate that regional financial performance is more strongly associated with fiscal capacity and dependency on central government transfers than with asset size or the number of audit findings.

Keywords: audit findings, dependency level, financial performance, local government characteristics, prosperity

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi isu penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, kewenangan tersebut juga menuntut adanya pertanggungjawaban yang lebih tinggi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Urgensi penelitian ini semakin kuat karena masih ditemukannya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Provinsi Papua. Pada tahun 2023, BPK mencatat adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran induk sebesar Rp1,57 triliun, yang terdiri atas belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, serta belanja tidak terduga (Rambat, 2023). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah perlu segera dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Provinsi Papua dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik daerah yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain, baik dari sisi geografis, sosial, ekonomi, maupun kapasitas fiskal daerah. Papua memiliki tantangan pembangunan yang kompleks, antara lain wilayah yang luas, aksesibilitas antardaerah yang tidak merata, serta ketergantungan yang relatif tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah di Provinsi Papua juga memiliki variasi dalam kemampuan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengelola aset, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit. Kondisi tersebut menjadikan Papua sebagai objek yang relevan untuk diteliti karena kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal. Dengan demikian, penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi Papua memiliki nilai penting karena dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pada daerah dengan tantangan fiskal dan administratif yang khas.

Karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit memiliki keterkaitan erat dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang diproksikan melalui total aset menunjukkan besarnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga semakin besar aset yang dikelola seharusnya semakin besar pula tuntutan terhadap efektivitas pengelolaan keuangannya. Kemakmuran daerah yang tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan secara mandiri, sehingga berpotensi meningkatkan kinerja keuangan daerah (Pradana et al., 2022). Sementara itu, tingkat ketergantungan menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi dapat menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah, sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain karakteristik daerah, temuan audit atas kepatuhan dan temuan audit atas keandalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga penting untuk dikaji karena menunjukkan adanya kelemahan dalam kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian internal. Semakin banyak temuan audit, maka semakin besar indikasi adanya permasalahan dalam tata kelola keuangan daerah yang dapat berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah, temuan audit, dan kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan, tetapi hasilnya masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Aulia dan Rahmawaty (2020) menemukan bahwa kemakmuran, ukuran pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, Amalia et al. (2021) menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah, hasil pemeriksaan audit, dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Bakri dan Rahardyan (2022) menunjukkan bahwa temuan pemeriksaan dan karakteristik daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun opini audit tidak berpengaruh signifikan. Penelitian yang lebih baru oleh Amin Insani et al. (2023) juga menunjukkan bahwa determinan kinerja keuangan pemerintah daerah masih perlu dikaji lebih lanjut karena setiap daerah memiliki kondisi fiskal, administratif, dan kelembagaan yang berbeda. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya terkait konsistensi pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan, serta temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada penggunaan objek kabupaten/kota di Provinsi Papua periode 2019–2022 dengan menguji secara khusus pengaruh faktor karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemilihan objek yang memiliki karakteristik fiskal dan geografis berbeda dibandingkan daerah lain, serta penggunaan variabel temuan audit atas kepatuhan dan temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal sebagai faktor yang dikaitkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis sebagai tambahan referensi dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah di Provinsi Papua dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat sistem pengendalian

internal, serta meminimalkan temuan audit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan, temuan audit atas kepatuhan, dan temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai dasar dalam menjelaskan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Teori keagenan menggambarkan adanya hubungan antara pihak pemberi mandat atau *principal* dan pihak penerima mandat atau *agent* melalui suatu kontrak kerja sama (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat berperan sebagai *principal*, sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai *agent* yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya publik, termasuk keuangan daerah.

Teori keagenan menjelaskan bahwa adanya asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang, rendahnya transparansi, serta lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai *principal*. Dalam penelitian ini, teori keagenan digunakan untuk menjelaskan pentingnya karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit dalam memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah (Kusumasari, 2020).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kinerja keuangan dapat digunakan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Heryanti et al. (2019) menyatakan bahwa evaluasi kinerja penting dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara rencana dan realisasi kegiatan, menilai keberlanjutan kinerja, serta mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai telah sesuai dengan target yang diharapkan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan dapat dinilai melalui analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis tersebut diperlukan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan sumber daya keuangan lainnya. Dengan demikian, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah menggambarkan besar kecilnya suatu pemerintah daerah yang dapat dilihat dari jumlah sumber daya yang dimiliki. Dalam penelitian ini, ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan total aset. Total aset digunakan karena dianggap lebih stabil dibandingkan dengan jumlah pendapatan maupun jumlah pegawai. Pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar memiliki sumber daya yang lebih besar pula, sehingga dituntut untuk mampu mengelola aset secara efektif dan transparan.

Ukuran pemerintah daerah dapat memengaruhi kinerja keuangan karena semakin besar aset yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki aset besar diharapkan mampu memanfaatkan asetnya untuk mendukung pelayanan publik dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Namun, besarnya aset juga dapat menimbulkan tantangan apabila tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang baik (Kusumasari, 2020).

Kemakmuran

Kemakmuran daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik melalui sumber pendapatan yang dimiliki. Tingkat kemakmuran daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mencerminkan

kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan sah lainnya.

Semakin besar PAD yang diperoleh suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian dan kemakmuran daerah tersebut. Daerah yang memiliki tingkat kemakmuran tinggi diharapkan mampu membiayai kebutuhan daerah secara lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, kemakmuran daerah diduga memiliki keterkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah (Pradana et al., 2022).

Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah diatur untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang adil, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingkat ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kondisi ini dapat menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah. Sebaliknya, tingkat ketergantungan yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan daerahnya. Dengan demikian, tingkat ketergantungan diduga dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan Audit atas Kepatuhan

Temuan audit atas kepatuhan merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan ini dapat mencerminkan adanya kelemahan dalam kepatuhan pemerintah daerah terhadap aturan pengelolaan keuangan.

Audit memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin banyak temuan audit atas kepatuhan, maka semakin besar indikasi adanya permasalahan dalam tata kelola keuangan daerah. Oleh karena itu, temuan audit atas kepatuhan diduga memiliki keterkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan Audit atas Keandalan Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP bertujuan untuk menciptakan kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Kelemahan tersebut dapat berdampak pada rendahnya kualitas pengelolaan keuangan, meningkatnya risiko kesalahan pencatatan, dan lemahnya pengawasan internal. Dengan demikian, temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal diduga dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan besarnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, khususnya dalam bentuk aset. Pemerintah daerah dengan aset yang besar memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan program pembangunan. Namun, aset yang besar juga menuntut kemampuan pengelolaan yang baik agar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja keuangan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda. Aulia dan Rahmawaty (2020) serta Latifah dan Amalia (2022) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Aafiah Millenia (2022) dan Pradana et al. (2022) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua.

Pengaruh Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kemakmuran daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menggali potensi ekonomi lokal. Semakin tinggi tingkat kemakmuran daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri.

Aafiah Millenia (2022), Aulia dan Rahmawaty (2020), Manoppo et al. (2023), serta Pradana et al. (2022) menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar PAD suatu daerah, maka semakin baik pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Kemakmuran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi cenderung memiliki kemandirian fiskal yang rendah. Kondisi ini dapat memengaruhi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan temuan. Pradana et al. (2022), Latifah dan Amalia (2022), Aulia dan Rahmawaty (2020), serta Aafiah Millenia (2022) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, Bakri dan Rahardyan (2022) menemukan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Tingkat ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua.

Pengaruh Temuan Audit atas Kepatuhan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit atas kepatuhan menunjukkan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin banyak temuan audit atas kepatuhan, semakin besar indikasi adanya kelemahan dalam tata kelola keuangan daerah. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kurnia (2020) menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh negatif secara statistik terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara itu, Latifah dan Amalia (2022) menemukan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh temuan audit atas kepatuhan terhadap kinerja keuangan masih perlu diuji kembali. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: Temuan audit atas kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua.

Pengaruh Temuan Audit atas Keandalan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal yang lemah dapat menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi kurang efektif, meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, serta mengurangi keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pradana et al. (2022) dan Tjandrakirana et al. (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, Bakri dan Rahardyan (2022) menemukan bahwa temuan pemeriksaan atas kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H5: Temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Penelitian kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2013). Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan, temuan audit atas kepatuhan, dan temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk angka dan dianalisis menggunakan prosedur statistik (Indriantoro & Supomo, 2016).

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua. Objek penelitian terdiri dari sembilan pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, dan Kota Jayapura. Pemilihan Provinsi Papua sebagai objek penelitian didasarkan pada adanya fenomena pengelolaan keuangan daerah yang masih memerlukan evaluasi, serta karakteristik daerah yang memiliki perbedaan dari sisi kemampuan fiskal, tingkat ketergantungan, dan pengelolaan keuangan daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua yang memiliki laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan hasil pemeriksaan pada periode 2019–2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus atau sampel jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini terdiri dari sembilan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua selama empat tahun pengamatan, sehingga jumlah data observasi yang digunakan sebanyak 36 observasi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat dianalisis menggunakan teknik statistik. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau laporan resmi. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, laporan realisasi anggaran, neraca, serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Sumber data berasal dari situs resmi Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta kantor BPK Provinsi Papua.

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel independen terdiri dari ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan, temuan audit atas kepatuhan, dan temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal.

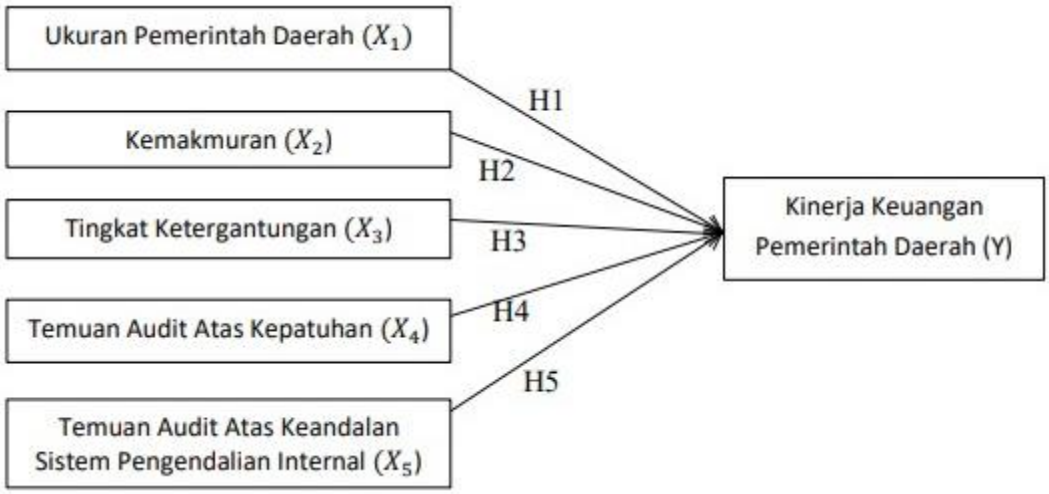
Tabel 1. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Simbol	Pengukuran
1	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Y	Rasio Efektivitas = Realisasi PAD / Target PAD × 100%
2	Ukuran Pemerintah Daerah	X1	Ln Total Aset
3	Kemakmuran	X2	Pendapatan Asli Daerah atau Ln PAD
4	Tingkat Ketergantungan	X3	Dana Transfer / Total Pendapatan Daerah × 100%
5	Temuan Audit atas Kepatuhan	X4	Jumlah temuan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
6	Temuan Audit atas Keandalan Sistem Pengendalian Internal	X5	Jumlah temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan rasio efektivitas. Kriteria penilaian rasio efektivitas diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu sangat efektif apabila nilai rasio lebih dari 100%, efektif apabila mencapai 100%, cukup efektif apabila berada pada kisaran 90%–99%, kurang efektif apabila berada pada kisaran 75%–89%, dan tidak efektif apabila kurang dari 75%.

Model Penelitian

Model penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan, temuan audit atas kepatuhan, dan temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Model penelitian menunjukkan bahwa kelima variabel independen tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024.

Model Analisis Regresi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KKPD = \alpha + \beta 1UPD + \beta 2KM + \beta 3TK + \beta 4TAK + \beta 5TSPI + e$$

Keterangan:
KKPD = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
α = Konstanta
β1–β5 = Koefisien regresi
UPD = Ukuran Pemerintah Daerah
KM = Kemakmuran
TK = Tingkat Ketergantungan
TAK = Temuan Audit atas Kepatuhan
TSPI = Temuan Audit atas Keandalan Sistem Pengendalian Internal
e = Error

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS. Tahapan analisis data diawali dengan pengujian statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat sebagai model yang baik. Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Setelah model memenuhi asumsi klasik, pengujian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial atau uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, dilakukan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil analisis ini digunakan untuk menentukan apakah ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan, temuan audit atas kepatuhan, dan temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Objek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, dan Kota Jayapura selama periode 2019–2022. Data yang diolah dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat jumlah temuan audit.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.23 berikut.

Tabel 2. Test of Normality Kolmogorov-Smirnov

Keterangan	Unstandardized Residual
N	36
Normal Parameters Mean	.0000000
Normal Parameters Std. Deviation	3.64301587
Most Extreme Differences Absolute	.145
Most Extreme Differences Positive	.085
Most Extreme Differences Negative	-.145
Test Statistic	.145

Asymp. Sig. (2-tailed)	.054[c]

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 2, diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,054. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data pada grafik normal probability plot. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hasil pengujian, titik-titik pada grafik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antarvariabel independen dalam model regresi. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
UPD	.908	1.101	Non multikolinearitas
Kemakmuran	.293	3.414	Non multikolinearitas
TK	.387	2.583	Non multikolinearitas
TPATUH	.628	1.593	Non multikolinearitas
TSPI	.678	1.474	Non multikolinearitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Variabel UPD memiliki nilai tolerance sebesar 0,908 dan VIF sebesar 1,101. Variabel kemakmuran memiliki nilai tolerance sebesar 0,293 dan VIF sebesar 3,414. Variabel TK memiliki nilai tolerance sebesar 0,387 dan VIF sebesar 2,583. Variabel TPATUH memiliki nilai tolerance sebesar 0,628 dan VIF sebesar 1,593. Variabel TSPI memiliki nilai tolerance sebesar 0,678 dan VIF sebesar 1,474. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Hasil uji autokorelasi disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Uji Autokorelasi Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.696[a]	.485	.399	3.93491	1.870

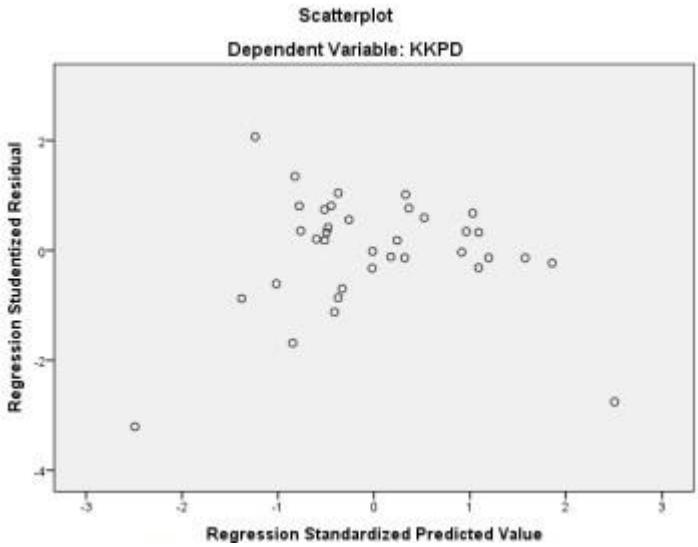
Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,870. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model regresi berada pada daerah bebas autokorelasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian

heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antara nilai ZPRED dan SRESID. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Grafik Scatterplot

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Selain itu, titik-titik tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan, temuan audit atas kepatuhan, dan temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Analisis Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta
(Constant)	48.345	97.398	
UPD	6.117	3.407	.247
Kemakmuran	-3.072	.934	-.797
TK	-67.121	13.652	-1.036
TPATUH	-.363	.239	-.251
TSPI	.281	.256	.174

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 5, maka persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

KPD = 48,345 + 6,117 UPD – 3,072 Kemakmuran – 67,121 TK – 0,363 TPATUH + 0,281 TSPI + e

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 48,345 menunjukkan bahwa apabila variabel ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan, temuan audit atas kepatuhan, dan temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal bernilai nol, maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 48,345.

Koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah sebesar 6,117 menunjukkan bahwa setiap peningkatan ukuran pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 6,117, dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Koefisien regresi variabel kemakmuran sebesar -3,072 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kemakmuran akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 3,072, dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Koefisien regresi variabel tingkat ketergantungan sebesar -67,121 menunjukkan bahwa setiap peningkatan

tingkat ketergantungan akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 67,121, dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Koefisien regresi variabel temuan audit atas kepatuhan sebesar -0,363 menunjukkan bahwa setiap peningkatan temuan audit atas kepatuhan akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,363, dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Koefisien regresi variabel temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal sebesar 0,281 menunjukkan bahwa setiap peningkatan temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,281, dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.696[a]	.485	.399	3.93491

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,399. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan, temuan audit atas kepatuhan, dan temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal sebesar 39,9%. Sementara itu, sisanya sebesar 60,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji t disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	.623	
UPD	.083	Tidak berpengaruh signifikan
Kemakmuran	.003	Berpengaruh signifikan
TK	.000	Berpengaruh signifikan
TPATUH	.140	Tidak berpengaruh signifikan
TSPI	.282	Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 7, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,083. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel kemakmuran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga kemakmuran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel tingkat ketergantungan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga tingkat ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, variabel temuan audit atas kepatuhan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,140. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga temuan audit atas kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,282. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan di Provinsi Papua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,083 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat diterima. Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini diproksikan dengan total aset. Hasil ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya aset yang dimiliki pemerintah daerah belum tentu mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Secara teoritis, pemerintah daerah yang memiliki aset besar seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Namun, dalam konteks Provinsi Papua, besarnya total aset belum tentu mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset secara efektif dan produktif. Aset yang besar dapat menjadi beban apabila tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan manfaat ekonomi maupun pelayanan publik. Dengan demikian, ukuran pemerintah daerah tidak secara langsung menentukan baik atau buruknya kinerja keuangan, karena kinerja keuangan lebih dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi penggunaan aset tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aafiah Millenia (2022) dan Pradana et al. (2022) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Aulia dan Rahmawaty (2020) serta Latifah dan Amalia (2022) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan karakteristik objek penelitian, periode pengamatan, serta kemampuan masing-masing daerah dalam mengoptimalkan aset yang dimiliki.

Pengaruh Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan di Provinsi Papua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemakmuran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diterima. Namun, berdasarkan nilai koefisien regresi sebesar -3,072, pengaruh kemakmuran terhadap kinerja keuangan menunjukkan arah negatif. Artinya, peningkatan kemakmuran yang diproksikan melalui Pendapatan Asli Daerah tidak selalu diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Papua yang memiliki tingkat kemakmuran lebih tinggi belum tentu mampu menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan efektivitas pengelolaan anggaran, efisiensi belanja, dan perencanaan keuangan yang tepat. Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agent memiliki tanggung jawab untuk mengelola pendapatan daerah secara akuntabel kepada masyarakat sebagai principal. Apabila peningkatan pendapatan tidak dikelola secara efektif, maka kemakmuran daerah belum tentu memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Aafiah Millenia (2022), Aulia dan Rahmawaty (2020), Manoppo et al. (2023), dan Pradana et al. (2022) yang menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, arah pengaruh negatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD pada pemerintah daerah di Provinsi Papua masih perlu diimbangi dengan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, kemakmuran daerah tidak hanya perlu dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan pendapatan tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan di Provinsi Papua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diterima. Nilai koefisien regresi sebesar -67,121 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan memiliki arah pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Artinya, semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, maka kinerja keuangan pemerintah daerah cenderung menurun.

Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Papua masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat dapat membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan daerah. Selain itu, tingginya ketergantungan juga dapat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah masih belum optimal. Dalam perspektif teori keagenan, kondisi ini menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola dana transfer agar benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan tidak menimbulkan inefisiensi anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Bakri dan Rahardyan (2022) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Pradana et al. (2022), Latifah dan Amalia (2022), Aulia dan Rahmawaty (2020), serta Aafiah Millenia (2022) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh karakteristik fiskal Provinsi Papua yang memiliki ketergantungan relatif tinggi terhadap dana transfer pusat, sehingga perubahan tingkat ketergantungan lebih terlihat dampaknya terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Temuan Audit atas Kepatuhan terhadap Kinerja Keuangan di Provinsi Papua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit atas kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,140 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa temuan audit atas kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah temuan audit atas kepatuhan belum mampu menjelaskan perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah secara langsung.

Temuan audit atas kepatuhan pada dasarnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan. Secara teori, semakin banyak temuan audit atas kepatuhan, maka semakin besar indikasi adanya kelemahan dalam tata kelola keuangan daerah. Namun, dalam penelitian ini temuan audit atas kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh sifat temuan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun serta adanya perbedaan tingkat materialitas temuan pada masing-masing pemerintah daerah. Dengan kata lain, jumlah temuan audit belum tentu mencerminkan besarnya dampak temuan tersebut terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Latifah dan Amalia (2022) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil ini berbeda dengan Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh negatif secara statistik terhadap kinerja pemerintah daerah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh temuan audit atas kepatuhan terhadap kinerja keuangan dapat berbeda pada setiap daerah, tergantung pada karakteristik temuan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta kualitas pengawasan internal pemerintah daerah.

Pengaruh Temuan Audit atas Keandalan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan di Provinsi Papua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,282 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal belum mampu menjelaskan perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan.

Sistem pengendalian internal memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, andal, dan patuh terhadap peraturan. Secara teoritis, kelemahan dalam sistem pengendalian internal dapat meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, penyimpangan anggaran, serta rendahnya kualitas laporan keuangan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit atas keandalan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah temuan yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun, adanya temuan yang bersifat administratif, serta kemungkinan bahwa pemerintah daerah telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga dampaknya terhadap kinerja keuangan tidak terlihat secara langsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Pradana et al. (2022) dan Tjandrakirana et al. (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil ini berbeda dengan Bakri dan Rahardyan (2022) yang menyatakan bahwa temuan pemeriksaan atas kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan sangat bergantung pada kualitas implementasi pengendalian, tindak lanjut rekomendasi audit, serta tingkat keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki kelemahan yang ditemukan oleh auditor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya total aset yang dimiliki pemerintah daerah belum tentu mampu meningkatkan kinerja keuangan apabila aset tersebut tidak dikelola secara efektif dan produktif. Selanjutnya, tingkat kemakmuran daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator kemakmuran memiliki peran penting dalam menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatannya. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, semakin besar pula pengaruhnya terhadap kondisi kinerja keuangan daerah. Sementara itu, temuan audit atas kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah temuan audit atas kepatuhan belum secara langsung menentukan perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah. Demikian pula, temuan audit atas keandalan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga kelemahan sistem pengendalian internal yang ditemukan dalam pemeriksaan belum secara langsung memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah di Provinsi Papua diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar pengelolaan

keuangan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 39,9% menunjukkan bahwa masih terdapat 60,1% faktor lain di luar variabel penelitian ini yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain, seperti belanja modal, leverage, jumlah penduduk, umur pemerintah daerah, opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, atau kualitas sumber daya manusia agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

REFERENCES

Aafiah Millenia, N. (2022). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran dan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Syntax Admiration, 3(6), 786–803. https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.448

Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh leverage, jumlah penduduk dan umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah: Studi empiris pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat periode 2016–2020. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(3), 1098–1114. https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.750

Alfiani, A. N., Rahayu, S., & Nurbaiti, A. (2017). Jumlah temuan audit atas sistem pengendalian intern dan jumlah temuan audit atas kepatuhan terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, 9(1), 12–18.

Amalia, S., Nurlina, & Azhar, I. (2021). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, hasil pemeriksaan audit dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Langsa. Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra, 2(6), 371–384.

Amin Insani, Rahayu, S., & Erwati, M. (2023). Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah. Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 6(1), 109–125. https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.343

Aulia, R., & Rahmawaty. (2020). Pengaruh kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(4), 584–598. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia daring. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Bakri, M. R., & Rahardyan, T. M. (2022). Pengaruh opini, temuan dan karakteristik daerah terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi. Jurnal Akuntansi, 10(1), 1–14. https://doi.org/10.26460/ja.v11i1.2990

Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh kekayaan daerah, belanja daerah, intergovernmental revenue, temuan audit (BPK) terhadap kinerja pemerintah daerah: Studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau. Jurnal Al-Iqtishad, 16(2), 39. https://doi.org/10.24014/jiq.v16i2.10788

Heryanti, C. D., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 8(8).

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen. BPFE.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kurnia, D. (2020). Pengaruh temuan audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan struktur anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(1), 112–124. https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.11

Kusumasari, K. R., & Kartika, I. (2022). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan faktor audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah: Studi empiris pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 645–667.

Latifah, I. A., & Amalia, D. (2022). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja keuangan. National Multidisciplinary Sciences, 1(5), 735–743. https://doi.org/10.32528/nms.v1i5.227

Manoppo, D. C., Winerungan, R. R., & Tanor, L. A. O. (2023). Pengaruh tingkat kemakmuran daerah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 4(2), 428–437.

Pradana, Z. G. (2022). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, DAU, DAK, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah: Studi empiris pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017–2019. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rambat. (2023, Mei 24). Ada temuan Rp1,57 triliun, DPR Papua bentuk Pansus LHP BPK RI. Papua Terkini.

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Tjandrakirana, R., Ermadiani, Rohman, A., & Widad, A. (2019). Pengaruh laporan hasil pemeriksaan, ketidakpatuhan pada peraturan, kelemahan sistem pengendalian intern, dan tindak lanjut terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Sumatera Selatan. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, 12(2), 186–207. https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.02.002